



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan/atau penyempurnaan peta jabatan, struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai perlu menyusun nilai dan kelas jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/215/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah,
  - c. bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian atas Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran I dan lampiran II dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



TTD

H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KABUPATEN HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95  
 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	DINAS KESEHATAN			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	1	
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	1	
	DINAS SOSIAL			
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
7	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	1	
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	1	
9	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	1	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	1	
11	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	1	
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
14	Kepala Bidang Perindustrian	11	1	
15	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	11	1	
16	Kepala Bidang Kemetrolagian	11	1	
	UPTD PENGELOLA PASAR			
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar	9	1	
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	1	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
20	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	1	
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
22	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	1	
24	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	1	
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1	
26	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1	
27	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
28	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	1	
29	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	1	
30	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa	11	1	
31	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa	11	1	
32	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	1	
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA			
33	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja	14	1	
34	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja	12	1	
35	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1	
36	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1	
37	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
38	Kepala Bidang Koperasi	11	1	
39	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	11	1	
40	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Tenaga Kerja	11	1	
41	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	11	1	
42	Kepala Bidang Transmigrasi	11	1	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja			
43	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	9	1	
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
45	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14	1	
46	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12	1	
47	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	11	1	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
48	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1	
49	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
50	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	11	1	
51	Kepala Bidang Mutasi, Promosi Dan Kinerja	11	1	
	KECAMATAN PARINGIN			
52	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
53	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
54	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
55	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
56	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	KELURAHAN PARINGIN KOTA			
57	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	
58	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1	
59	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1	
	KELURAHAN PARINGIN TIMUR			
60	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	
61	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1	
62	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1	
	KECAMATAN PARINGIN SELATAN			
63	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
64	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
65	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
66	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
67	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	KELURAHAN BATU PIRING			
68	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1	
69	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1	
70	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1	
	KECAMATAN LAMPIHONG			
71	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
72	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
73	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
74	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
75	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	KECAMATAN BATUMANDI			
76	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
77	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
78	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
79	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
80	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	KECAMATAN AWAYAN			
81	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
82	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
83	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
84	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
85	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	KECAMATAN JUAI			
86	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
87	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
88	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
89	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
90	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	KECAMATAN TEBING TINGGI	0		
91	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
92	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
93	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
94	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
95	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	KECAMATAN HALONG			
96	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1	
97	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1	
98	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1	
99	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1	
100	Kepala Seksi Pembangunan	9	1	
	JUMLAH		100	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 95  
 TAHUN 2022 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DAFTAR HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup	FAKTOR 2 Pengaturan	FAKTOR 3 Wewenang	FAKTOR 4				FAKTOR 5 Kesulitan	FAKTOR 6 Kondisi Lain					
							4A Sifat	4B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	DINAS KESEHATAN																
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
	DINAS SOSIAL																
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
9	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
10	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
11	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
14	Kepala Bidang Perindustrian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
15	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
16	Kepala Bidang Kemetrolgian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
	UPTD PENGELOLA PASAR																
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup		FAKTOR 2 Pengaturan		FAKTOR 3 Wewenang		FAKTOR 4				FAKTOR 5 Kesulitan		FAKTOR 6 Kondisi Lain	
				4A Sifat	4B	8	9	10	11								
1	2	3	4	5		6		7		8				10		11	
20	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
21	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
22	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
24	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
25	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
26	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
27	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
28	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
29	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
30	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
31	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
32	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA																	
33	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
34	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
35	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
36	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
37	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
38	Kepala Bidang Koperasi	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
39	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
40	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Tenaga Kerja	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
41	Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
42	Kepala Bidang Transmigrasi	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja																	
43	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
44	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup	FAKTOR 2 Pengaturan	FAKTOR 3 Wewenang	FAKTOR 4				FAKTOR 5 Kesulitan	FAKTOR 6 Kondisi Lain					
							4A Sifat	4B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
45	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
46	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
47	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
48	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
49	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
50	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
51	Kepala Bidang Mutasi, Promosi Dan Kinerja	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
KECAMATAN PARINGIN																	
52	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
54	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
55	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
56	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
KELURAHAN PARINGIN KOTA																	
57	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
58	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
59	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
KELURAHAN PARINGIN TIMUR																	
60	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
61	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
62	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup	FAKTOR 2 Pengaturan	FAKTOR 3 Wewenang	FAKTOR 4				FAKTOR 5 Kesulitan	FAKTOR 6 Kondisi Lain					
							4A Sifat	4B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	KECAMATAN PARINGIN SELATAN																
63	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
64	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
65	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
66	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
67	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
	KELURAHAN BATU PIRING																
68	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
69	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
70	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
	KECAMATAN LAMPIHONG																
71	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
72	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
73	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
74	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
75	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
	KECAMATAN BATUMANDI																
76	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
77	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
78	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup		FAKTOR 2 Pengaturan		FAKTOR 3 Wewenang		FAKTOR 4				FAKTOR 5 Kesulitan		FAKTOR 6 Kondisi Lain			
				4A Sifat	4B	8	9	10	11										
1	2	3	4	5		6		7		8				9		10		11	
79	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
80	Kepala Seksi Pembangunan KECAMATAN AWAYAN	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
81	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
82	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
83	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
84	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
85	Kepala Seksi Pembangunan KECAMATAN JUAI	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
86	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
87	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
88	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
89	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
90	Kepala Seksi Pembangunan KECAMATAN TEBING TINGGI	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
91	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
92	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
93	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
94	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
95	Kepala Seksi Pembangunan KECAMATAN HALONG	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
96	Kepala Seksi Pemerintahan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
97	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
98	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
99	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		
100	Kepala Seksi Pembangunan	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310		

  
 BUPATI BALANGAN,  
 TTD  
 H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABUPATEN HUKUM SETDA  
 KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH  
 NIP. 19830710 201001 1 020